

**ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF
PADA PEGAWAI NEGERI DI BANK RIAU CABANG
PASIR PANGARAIAAN**

Skripsi Minor

**Disusun Dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Tugas-Tugas Akademik Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya**



OLEH

DESI SASNITA

NIM: 00774000335

**PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2010

**ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF
PADA PEGAWAI NEGERI DI BANK RIAU
CABANG PASIR PANGARAIAN
Oleh : DESI SASNITA
ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit konsumtif di Bank Riau cabang Pasir Pangaraian khususnya pada pegawai negeri. penelitian ini dilakukan pada Bank Riau cabang Pasir Pangaraian yang terletak di JL. pasar senin Pasir Pangaraian. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli sampai Agustus 2009, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dengan jenis data sekunder. Objek penelitian ini adalah kredit konsumtif pada bank riau yang meliputi sistem, prosedur, perkembangan dan pelayanan yang diberikan dalam penyaluran kredit kepada nasabah.

Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Di Bank Riau produk kredit konsumtif terdiri atas beberapa bagian yaitu, kredit aneka guna, kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kartu kredit. Melalui produk kredit konsumtif ini, Bank Riau memberikan kemudahan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendapatkan pinjaman kredit.

Secara umum kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam menyalurkan kredit konsumtif oleh pihak Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian yaitu nasabah yang memenuhi persyaratan atau layak untuk diberikan pinjaman. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Riau yaitu, Foto copy KTP, surat kuasa pemotongan gaji, pas photo suami/istri, Foto copy surat nikah, agunan berupa SK CPNS, SK PN, SK Terakhir, Karpeg, Taspen dan surat tanah dengan status SKGR.

Dalam menyalurkan kreditnya Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian menetapkan beberapa prosedur kepada nasabahnya dimulai dari pengambilan formulir oleh nasabah, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara I, on the spot, wawancara II, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit dan penyaluran atau penarikan kredit.

Di Bank Riau perbandingan penyaluran kredit konsumtif di bandingkan kredit produktif, lebih besar kredit konsumtif dengan perbandingan 3:1. Dimana penyaluran kredit konsumtif yang paling besar adalah untuk pegawai negeri pada kredit aneka guna. Dari hasil penelitian diharapkan pihak Bank Riau dapat meningkatkan jumlah penyaluran kredit khususnya kredit konsumtif kepada masyarakat karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci : kredit konsumtif

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....iii

ABSTRAK.....v

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABEL.....viii

DAFTAR GAMBAR.....ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Perumusan Masalah.....8

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....8

D. Metode Penelitian..... 9

E. Sistematika Penulisan.....10

BAB II. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Perusahaan.....12

B. Fungsi Dan Tujuan Bank.....13

C. Produk Dan Layanan.....14

D. Visi Dan Misi.....20

E. Struktur Organisasi.....21

BAB III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori.....30

B. Analisis Pemberian Kredit.....	44
C. Tinjauan Praktek.....	48
D. Islam Tentang Kredit.....	62

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakatnya.

Jika ditelusuri lewat sejarah sejak dulu sampai sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini sampai masa yang akan datang setiap negara dan individu tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan, sosial atau perusahaan.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan itu tentu tidak salah karena mengingat fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam penciptaan uang, mengedarkan uang,

menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. (PSAK No.31. Tahun1999)

Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya.
3. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank pengkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas kepercayaan.

Fungsi utama bank adalah pemberian kredit pada peminjam yang dapat dipercaya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (UU RI.No.7 Tahun 1992)

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit (Debitur) bahwa kredit yang disalurkan benar-benar akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan yang mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. (Kasmir. 2002:93)

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank perlu terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, karakter, kemampuan untuk menciptakan pendapatan, pemilikan aset, kondisi perekonomian, dan faktor-faktor lainnya.

Tujuan utama analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjamannya sesuai

dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman. Bank harus menentukan kadar resiko yang akan dihadapi dalam setiap kasus dan jumlah kredit yang dapat diberikan mengingat resiko yang dihadapi. Selain itu, jika akan memberikan suatu pinjaman, perlu untuk menentukan syarat pemberian pinjaman tersebut.

Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bagi bank. Nasabah dalam hal ini akan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit di tagih alias macet. Walaupun sebenarnya ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya kredit macet seperti bencana alam yang memang tak mungkin dapat di hindari oleh nasabah seperti, banjir dan gempa bumi maupun kesalahan dalam pengelolaan tapi sebagian besar kredit macet di sebabkan oleh kesalahan dalam menganalisis penyaluran atau pemberian kredit pada nasabah.

Dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana atau pemberian kredit pada nasabah, perbankan tidak hanya diharuskan menganalisis sebelum penyaluran kredit tapi bank juga harus dapat menerapkan sistem pengumpulan dana dan penyaluran kredit yang dapat di andalkan dan di kelola dengan teratur dan cermat. Jika hal ini diabaikan maka bank nantinya akan mengalami kesulitan baik dalam menjaga atau mempertahankan kelangsungan bank maupun dalam meningkatkan pendapatan di kemudian hari.

PT. Bank Pembangunan Daerah Riau yang merupakan kelanjutan dari PT.BAPERI. terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai bank milik pemerintahan daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan daerah No.14 Tahun 1992, peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun1992, UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Sampai pada saat ini PT. Bank Riau telah memiliki 19 kantor cabang, salah satunya PT.Bank Riau Cabang Pasir pangaraian yang resmi dibuka pada tanggal 23 Maret 2001.

PT. Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian merupakan suatu lembaga keuangan yang diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan dana dari masyarakat dan disalurkan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini Bank Riau Cabang Pasir pangaraian memberikan fasilitas pelayanan kredit dan fasilitas layanan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Khususnya dalam pelayanan kredit Bank Riau Cabang Pasir pangaraian telah menyediakan berbagai produk kredit seperti, kredit UMKM, kredit komersil, kredit konsumtif, dan kredit kepada anggota koperasi.

Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau pemenuhan kebutuhan konsumtif nasabah dan keluarganya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan bermotor kredit aneka guna yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya, dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan. Sedangkan menurut bank itu sendiri kredit konsumtif adalah

pinjaman dana yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan atau gaji tetap.

Pemberian kredit konsumtif ini di khususkan pada pegawai negeri (PNS/CPNS) baik yang bekerja di Dinas Pendidikan dan Olahraga, Dinas pertambangan dan Energi, Dinas pertanian maupun yang lainnya. Dalam hal ini PT.Bank Riau selaku Kreditur harus menganalisa serta berhati-hati dalam pemberian kredit kepada Debitur supaya tidak terjadi hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.

Untuk memudahkan pelaksanaan analisa permintaan kredit yang diajukan serta meminimalisir resiko kredit di dalam kebijaksanaan umum perlu dimasukkan standar mutu kredit. jumlah permintaan kredit yang diterima bank, seringkali tidak sedikit. padahal jumlah kredit yang dapat memenuhi syarat biasanya hanya sedikit. Oleh karena itu untuk menghemat waktu petugas bank yang menanganinya, memberikan syarat-syarat yang dapat dipenuhi debitur agar permintaan kreditnya dapat dipertimbangkan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Para Debitur harus mengisi formulir permohonan kredit yang telah disiapkan oleh kreditur.
- b. Para debitur harus melampirkan hal-hal yang diperlukan seperti : foto copy KTP pemohon (suami istri) bagi yang sudah berkeluarga, foto copy surat nikah dan kartu keluarga, daftar penghasilan yang diketahui oleh pihak berwenang, SK CPNS, SK PNS, SK Terakhir, Karpeg,

Taspen atau Asabri, Surat persyaratan dari bendaharawan gaji, Surat Rincian Gaji, Surat Kuasa Pemotongan Gaji, Surat Rekomendasi Pimpinan Unit Kerja, SK Pensiun, Surat tanah dan Foto suami istri.

- c. Mempunyai jaminan, yang mana jaminan tersebut mempunyai nilai plafond kredit yang berbeda karena sesuai dengan jenis kredit yang diambil.

Setelah semua persyaratan tersebut dapat dipenuhi barulah petugas bank dapat menindak lanjuti atas permohonan kredit yang diajukan oleh Nasabah, Apakah kredit yang diajukan disetujui ataupun ditolak.

Dari tabel dibawah ini dapat diketahui bahwa setiap periode jumlah anggaran kredit konsumtif oleh Bank Riau telah mencapai target yang telah dianggarkan.

Tabel I.1. Perkembangan kredit konsumtif yang telah disalurkan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian.

Tahun	Anggaran/Plafond (Rp.000)	Realisasi Disalurkan (Rp.000)	Persentase Realisasi Kredit(%)
2005	30.830.000	29.780.000	96,59%
2006	45.500.000	42.900.000	94,28%
2007	52.870.000	50.120.000	94,79%
2008	68.000.000	67.500.000	99,26%
2009	90.500.000	85.585.000	94,56%

Sumber : Dokumen Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kredit konsumtif dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang memuaskan sehingga setiap penyaluran kreditnya selalu mencapai target yang diinginkan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mempelajari proses penyaluran kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi khususnya Pegawai Negeri yang membutuhkan, maka laporan tugas akhir ini penulis memberikan judul **“Analisis Sistem Pemberian Kredit Konsumtif Pada Pegawai Negeri Di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pemberian kredit konsumtif pada pegawai negeri di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian ?
2. Apa kriteria yang ditetapkan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dalam pemberian kredit konsumtif ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit konsumtif di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian khususnya pada Pegawai Negeri.
 - b. Untuk mengetahui apa saja kriteria yang ditetapkan oleh Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dalam pemberian kredit konsumtif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Diploma Tiga pada program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Melalui penelitian ini, dapat menambah pengetahuan penulis khususnya tentang sistem pengkreditan.
- c. Dengan penelitian ini, semoga dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan bagi pihak bank.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian. Penelitian ini dilaksanakan selama magang di instansi tersebut yaitu pada tanggal 01 Juli-31 Agustus 2009.

2. Jenis dan Sumber Data.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dalam hal ini adalah pimpinan juga staf karyawan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literature, dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu, pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pimpinan atau dengan karyawan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian khususnya tentang pengkreditan.
- b. Studi Dokumen yaitu, pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian serta meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan data lainnya yang disediakan oleh perusahaan.
- c. Observasi yaitu, pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang kegiatan-kegiatan yang akan diteliti.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian meliputi : sejarah singkat

berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Riau atau Bank Riau, fungsi dan tujuan, produk dan layanan, visi dan misi dan struktur organisasi bank.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.

Pada bab ini membahas tentang tinjauan teori dan praktek yang meliputi: pengertian analisis dan sistem, pengertian kredit, jenis kredit, tujuan dan fungsi kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, ketentuan yang ditetapkan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dalam menyalurkan kreditnya, kriteria yang ditetapkan dalam pemberian kredit, kebijaksanaan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dalam menyalurkan kredit, aspek-aspek dan asas-asas yang digunakan bank riau cabang pasir pangaraian serta prosedur yang digunakan dalam penyaluran kredit konsumtif, dan pandangan islam tentang kredit.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab yang terakhir dimana penulis akan mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran atau masukan bagi Bank Riau Cabang Pasir pangaraian yang mungkin akan bermanfaat bagi penyaluran kredit khususnya kredit konsumtif.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan akte notaris Syawal sultan diatas No. 1 Tanggal 2 Agustus 1961, dan izin menteri keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-45 Tanggal 12 Agustus 1961, selanjutnya dengan surat keputusan gubernur KDH. Tk.I Riau No.51/IV/1966 tanggal 1 April 1966 dinyatakan berakhir segala kegiatan PT. BAPERI.

Seluruh Aktiva dan Passiva PT.BAPERI di lebur ke dalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau di mulai dengan status sebagai Bank milik Pemerintahan Daerah Riau. Status pendirian Bank Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah Daerah No. 14 Tahun 1992, peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992, UU No.10Tahun 1998 tentang perbankan.

Kemudian sesuai dengan keputusan RUPS Tanggal 26 Juni 2002 serta akta pendirian perseroan terbatas No.36 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Ham dengan surat keputusan No.C-09851. HT.01.TH. 2003 Tanggal 5 Mei 2003 dan persetujuan Deputy Gubernur senior Bank Indonesia No.

5/30/KEP.065/2003. Status Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Sampai akhir tahun 2007 PT. Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 19 kantor cabang dan 15 kantor cabang pembantu, 8 kantor kas, 1 kantor kas syariah serta *payment point* yang tersebar diseluruh Kabupaten atau kota di Riau. Salah satu cabang PT. Bank Riau adalah Bank Riau Cabang Pasir pangaraian yang resmi dibuka pada tanggal 23 Maret Tahun 2001.

B. Fungsi Dan Tujuan Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. adapun fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. (UU. Perbankan No.7 Tahun 1992.)

Salah satu fungsi utama bank umum adalah kesanggupannya untuk menciptakan dan menghancurkan uang. Hal ini dilakukan dengan kegiatan pemberian pinjaman, investasi dan kerja sama dengan bank sentral. dalam hal menciptakan uang, bank dapat memberikan jasa kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal kerja ataupun keperluan lainnya.

Menyediakan mekanisme pembayaran, atau pemidahbukuan dana, merupakan fungsi penting yang dilakukan oleh bank umum, dan fungsi ini

semakin penting karena penggunaan cek dan kartu kredit yang semakin besar. Sebagian besar cek biasanya dikliringkan melalui sistem perbankan umum. Cek yang ditarik dan didepositokan pada bank yang sama semata-mata pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening yang lainnya.

Dalam praktiknya bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang berlebihan kemudian disimpan di bank. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana (membutuhkan dana).

Sedangkan tujuan Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 1999 Bab III Pasal 7 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah. Adapun tugas dari Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur serta menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengawasi bank yang ada di Indonesia.

Begitu juga dengan Bank Riau cabang pasir pangaraian fungsi dan tujuannya adalah untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat pasir pangaraian.

C. Produk Dan Layanan

Setiap kegiatan perbankan mempunyai produk dan layanan yang menjadi ciri khasnya untuk menarik nasabah agar menyimpan dananya pada bank yang

bersangkutan. PT.Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dalam perkembangannya mempunyai usaha-usaha pokok antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai Penghimpun Dana

Sebagai penghimpun dana dari masyarakat Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian menerima simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan.

a. Deposito

Menurut Undang-Undang perbankan yang dimaksud dengan Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank. Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan maka uang tersebut dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian terdapat beberapa macam deposito berjangka yaitu deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.

b. Giro

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

c. Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Produk tabungan Bank Riau terdiri dari Tabungan Sinar, Tabungan Simpeda, Tabungan iB Dhuha dan Tabungan iB SINAR Bank Riau.

2. Sebagai Penyalur Dana

Sebagai penyalur dana Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian berusaha menyalurkan dana yang diperoleh kepada masyarakat dengan memberikan berbagai macam kredit, seperti :

a. Kredit Investasi

kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang yang diberikan kepada pengusaha guna membiayai barang modal serta jasa yang diperlukan baik untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan proyek baru dengan menitik beratkan pada kenyataan usaha dan mempunyai kemampuan untuk berusaha.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha atau perusahaan menengah dan kecil guna pembiayaan modal kerja.

c. Kredit Komsumtif

Yang dimaksud kredit konsumsi adalah kredit jangka pendek dalam skala kecil dan menengah, dalam membantu keperluan konsumsi nasabah, seperti kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, kredit aneka guna dan sebagainya yang dipersamakan dengan itu.

d. Kredit produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

3. Jasa Pembayaran Lain

Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, maka semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup disatu bank saja.

Jasa-jasa pembayaran perbankan lainnya, ini merupakan sebuah jasa yang diberikan oleh Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian yang meliputi jasa-jasa bank sebagai berikut :

- a. Jasa Inkaso, yaitu kegiatan membantu nasabah dalam menyelesaikan tagihan-tagihan berupa warkat-warkat, atau surat lainnya berupa wesel, cek, dan bilyet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

- b. Transfer dalam negeri, yaitu jasa perbankan yang diberikan dalam pengiriman uang dalam negeri dengan surat telex, faxsimille dan telepon. Lama pengiriman tergantung sarana yang digunakan untuk mengirim.
- c. Pembayaran kwitansi telepon
- d. Melayani pembayaran-pembayaran

Sama halnya seperti dalam menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain, Jasa pembayaran pensiun kepada pegawai negeri sipil (PNS), pembayaran gaji pegawai negeri sipil, dan pembayaran dividen

- e. Bank card (kartu kredit)

Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga kartu plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat pembelanjaan atau tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM yang tersebar diberbagai tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan

4. Ketentuan Menabung.

Untuk menjadi penabung SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) maka calon penabung terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan-ketentuan

serta prosedur yang ditetapkan oleh Bank Riau. Adapun ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Simpeda dapat diikuti oleh setiap orang, yayasan, badan hukum dan lembaga-lembaga lainnya.
- b. Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan kepada pihak bank.
- c. Bank Riau memberikan bunga yang dihitung berdasarkan saldo terendah setiap hari dan dibukukan langsung dengan mengkreditkan tabungan setiap awal bulan berikutnya.
- d. Penabung tidak dibebani materai atas penyetoran dan pengambilan tabungan dan dapat dijadikan jaminan kredit oleh penabung pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian.
- e. Apabila terjadi selisih saldo antara buku tabungan dengan catatan bank, maka bank akan menganggap saldo yang benar adalah saldo yang terdapat pada catatan bank.
- f. Buku tabungan diberikan secara gratis.

5. Prosedur Menabung

Untuk menjadikan penabung SIMPEDA sebagai seorang nasabah harus melalui prosedur-prosedur sebagai berikut:

- a. Calon penabung datang langsung ke Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian, disana petugas bank akan menyiapkan kartu contoh tanda tangan dan slip penyetoran untuk diisi oleh penabung.
- b. Penabung menyerahkan karu contoh tanda tangan dan slip yang telah diisi disertai tanda pengenal yang masih berlaku.
- c. Petugas akan memeriksa dan memisahkan serta memasukkan data penabung ke komputer.
- d. Kartu tanda pengenal akan dikembalikan kepada penabung disertai dengan buku tabungan dengan demikian calon penabung sudah menjadi penabung pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian.

D. Visi Dan Misi

Dengan tema sentral “ *Reaching The Exelence*” Bank Riau berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaiknya kepada nasabah dan pemegang saham melalui refedinisi paradigma bisnis kearah yang lebih baik secara berkelanjutan dengan Motto “*The Spirit to Grow* “ Tumbuh dan tumbuh menuju yang terbaik. Sesuai dengan Visi dan Misi Bank Riau di era tranformasi ini yaitu :

1. Visi

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memperdayakan perekonomian rakyat.

2. Misi

- a. Sebagai Bank “Sehat”, elit dan merakyat.
- b. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.
- c. Sebagai pengelola Dana Pemerintahan Daerah.
- d. Sebagai sumber pendapatan Daerah.
- e. Membina dan mengembangkan Usaha Kecil Menengah.

E. Struktur Organisasi

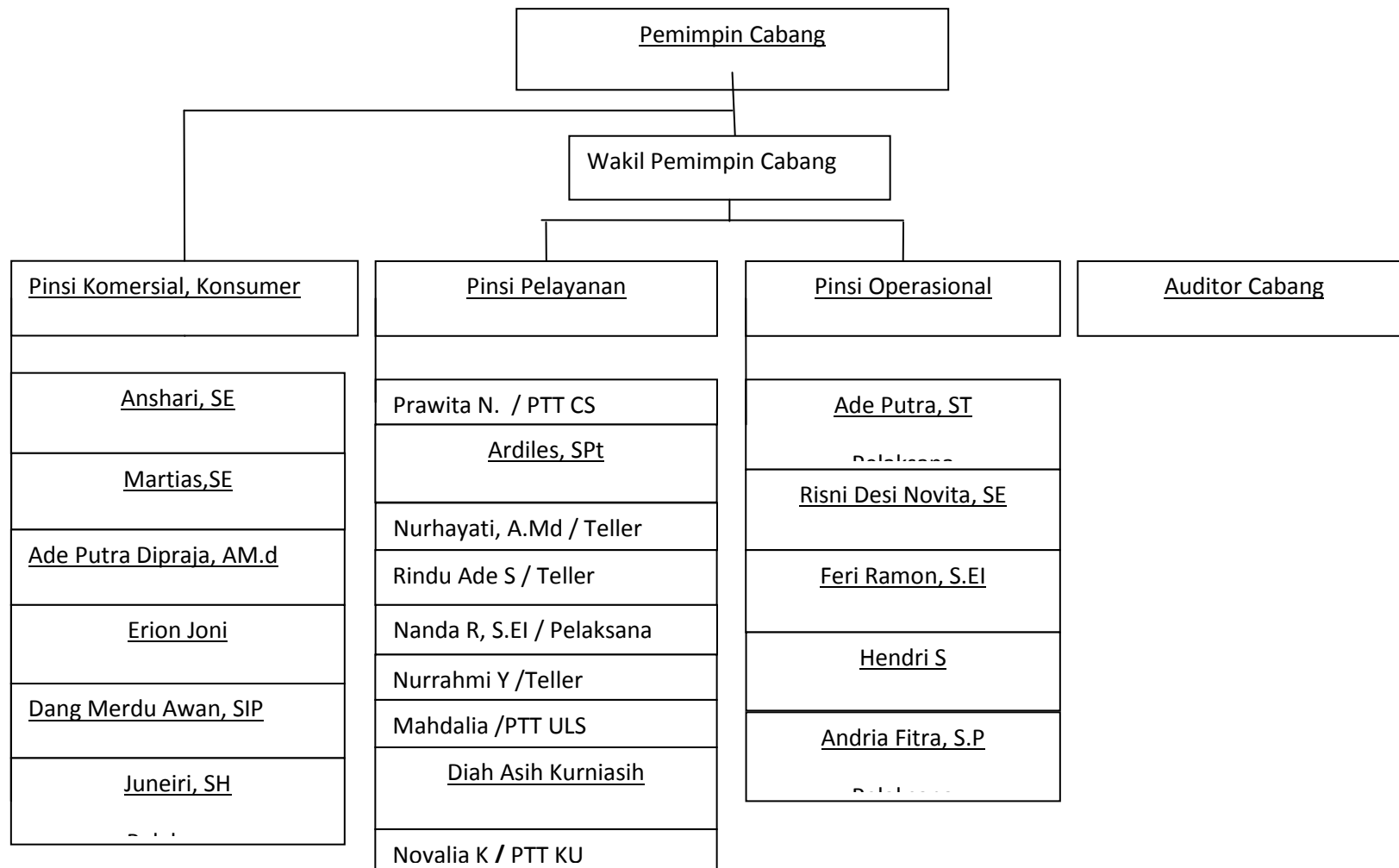
Dalam suatu perusahaan sedang berkembang dimana kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan semakin luas dan kompleks, maka untuk mendukung kelancaran kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi diperlukan koordinasi kesatuan dalam tindakan dan berbuat serta mengawasan yang lebih terjamin dalam bentuk struktur organisasi.

Setiap badan organisasi ataupun perusahaan mempunyai tujuan atau kehendak yang telah ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan maupun keluwesan atau fleksibel. Hal ini dimaksudkan karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian didalam struktur organisasi akan tergambar pengaturan dan pengklasifikasian tugas dan tanggung jawab serta wewenang personal serta bagian dan seksi yang terdapat dalam organisasi. Disana juga tergambar jaringan-jaringan koordinasi antara fungsi dan seluruh aktivitas organisasi.

Agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, maka orang yang bekerja dalam suatu organisasi dapat diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing orang tersebut dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap unsur dalam organisasi mengerti akan tugas dan tanggung jawab.

Untuk menggambarkan secara sistematis hubungan kerja antara unsur-unsur organisasi maka harus terdapat struktur organisasi pada Bank Riau memakai bentuk standar organisasi garis. Adapun skemanya dapat dilihat pada gambar.



Adapun penjelasan dari setiap bagan yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah, antara lain :

- a. Merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktifitas kantor cabang utama sejalan dengan kebijaksanaan dengan memastikan bahwa pegawai selalu memberikan pedoman yang digariskan kantor pusat.
- b. Memaksimalkan tingkat pelayanan dan protabilitas dengan memastikan bahwa pegawai selalu memberikan pelayanan bermutu tinggi kepada nasabah.
- c. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kerja sama dengan relasi dan nasabah.

Pertanggung jawaban dan pelimpahan wewenang.

- a. Pimpinan cabang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab pada direksi.
- b. Bertanggung jawab dengan wewenang mewakili Bank Riau dalam mengadakan hubungan pihak ketiga berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas kantor cabang.

- c. Dalam hal pimpinan tidak berada ditempat atau berhalangan melakukan tugasnya, maka tugas dan tanggung jawab dilakukan dan diambil alih oleh Wapincap atau pimpinan seksi yang ditunjuk oleh pimpinan cabang jika kantor tersebut tidak mewakili Wapincab.

2. Pimpinan Seksi Pemasaran

Pimpinan seksi pemasaran mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mencari nasabah dan memasarkan produk dan jasa bank serta memperluas peluang aktivitas usaha didaerah kerja kantor cabang.
- b. Memasarkan, membuat aplikasi dan menganalisa permohonan kredit serta memantau rekening nasabah.
- c. Mengelola dan menyelesaikan kredit bermasalah, kredit diragukan, kredit macet, serta kredit hapus buku.

Pertanggung jawaban dan wewenangnya.

- a. Pimpinan seksi pemasaran dalam menjalankan tugasnya dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.
- b. Dalam hal pimpinan seksi pemasaran tidak berada ditempat atau berhalangan melakukan tugasnya, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh salah seorang pimpinan seksi yang ditunjuk oleh pimpinan cabang terkecuali pimpinan kontrol intern.

3. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

Pimpinan seksi pelayanan nasabah mempunyai tugas :

- a. Mengusahakan agar tercipta mutu pelayanan yang baik bagi nasabah sehingga tercapai tingkat efisiensi dan aktivitas pekerjaan guna mencapai laba optimal.
- b. Melakukan pengendalian kas dan likuiditas beserta perangkat pengamatnya guna menghindari berbagai macam resiko pengelolaan kas

Pertanggung jawaban dan pelimpahan wewenang.

- a. Pimpinan seksi pelayanan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada pimpinan cabang.
- b. Dalam hal pimpinan seksi pelayanan nasabah tidak berda ditempat atau berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka tugas dan wewenangnya diambil alih oleh salah seorang pimpinan seksi yang ditunjuk oleh pimpinan cabang terkecuali pimpinan kontrol intern.

Seksi pelayanan nasabah terdiri dari :

- a. Pelayanan nasabah dan informasi

Mengelola dan mengusahakan agar kegiatan pelayanan informasi dan pelayanan nasabah berjalan dengan lancar, efektif dan efisiensi sesuai dengan prosedur dan pedoman kerja yang telah ditetapkan.

b. Pelaksana kas dan teller

Mengatur, mengusahakan dan mengendalikan kegiatan diseksi kas atau teller secara efektif dan efisien serta melakukan pengawasan agar seluruh perangkat kerja teller dapat berfungsi dengan baik.

4. Pimpinan Seksi Operasional.

Pimpinan seksi operasional mempunyai tugas :

- a. Mengusahakan agar proses administrasi yang berkaitan dengan kredit, transaksi dalam negeri, kliring, kepegawaian dan pengelolaan barang atau aktiva tetap dapat dilaksanakan secara aman, efektif dan efisiesi.
- b. Melaksanakan kegiatan pembukuan dalam membuat laporan keuangan kantor cabang.

Pertanggung jawaban dan pelimpahan wewenangnya.

- a. Pimpinan seksi operasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.
- b. Dalam hal pimpinan seksi operasional tidak berada ditempat atau berhalangan melakukan tugasnya, maka tugas dan wewenangnya diambil oleh salah seorang pimpinan seksi yang ditunjuk oleh pimpinan cabang terkecuali pimpinan kontrol intern.

Seksi pelayanan nasabah terdiri dari :

a. Pelaksana akuntansi dan laporan

Mengelola proses pembukuan dan membuat laporan keuangan neraca dan laba kantor cabang serta mengupayakan penyelesaian daftar pos terbuka antar cabang.

b. Pelaksana administrasi kredit

Mengelola administrasi kredit disertai dengan sistem pengamanan terhadap dokumen debitur sesuai dengan pedoman dan kebijaksanaan pengkreditan.

c. Pelaksana administrasi kas daerah

Mengelola dan menyelenggarakan administrasi kas daerah Tk. II dan sebagai pembantu pemegang kas daerah (PPKD) Tk. I Riau

5. Auditor Intern

Tugasnya memantau pimpinan cabang dalam usaha terlaksananya control internal atau pengawasan melekat terhadap pegawai dan aktivitas kerjanya, sehingga tingkat efisiensi dan tahap berikutnya dapat memperkecil resiko kesalahan dan kegagalan kerja, memeriksa voucher-voucher pembukuan tentang keabsahan, wewenang, tanda tangan dan kebenaran pengisian serta meneliti hasil *print out*, memeriksa posting nomor rekening dan nominal yang disesuaikan dengan rahasia dan alat-alat pengaman tersimpan dan terpelihara sebagaimana

mestinya, melaksanakan kontrol harian sesuai rencana kerja, menganalisa realisasi biaya dan pendapatan dibandingkan dengan anggaran melakukan pemeriksaan atau audit khusus secara periodik di unit-unit kerja kantor cabang.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Analisis dan Sistem

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa yunani (*sustema*) yang berarti suatu kesatuann yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi.

Menurut Mulyadi, pengertian sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang bersama-sama mencapai tujuan tertentu dan di ciptakan untuk menangani suatu hal yang bersama.(Mulyadi, 2001: 2)

Menurut Kamus ilmiah populer kontemporer, sistem adalah suatu metode,cara yang teratur untuk melakukan sesuatu. (Alex MA, 2005:599)

Analisa adalah analisis, uraian, kupasan sedangkan analisis adalah sifat uraian, penguraian atau kupasan. (Alex MA,2005:32)

2. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credo* yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya, atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan *credo* yang berasal dari kombinasi perkataan sansakerta *cred* yang berarti kepercayaan dan perkataan latin

do, yang berarti saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa latin, kata kerjanya dan kata bendanya menjadi *credere* dan *creditum* tapi banyak yang mengemukakan bahwa kredit berasal dari kata *credere*.

Dalam bahasa sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar melalui cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk uang ataupun berbentuk barang.

“menurut Kasmir, kredit adalah pembiayaan yang berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), dengan perjanjian yang telah dibuat”. (Kasmir, 2001: 73)

“menurut Lukman Dendawijaya, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang disepakati’. (Lukman Dendawijaya, 2002:82).

“Menurut Rivai, dkk, kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”. (Rivai,dkk. 2007:438)

Menurut Undang-Undang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (UU. Perbankan No. 10 Tahun 1998).

Kredit juga dapat diartikan sebagai suatu penyerahan nilai ekonomi sekarang atas dasar kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman barang, jasa atau uang antara pemberi pinjaman atau bank (kreditur) dengan penerima pinjaman atau nasabah (debitur) atas dasar kepercayaan dan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara kreditur dengan debitur. Dan dikembalikan pada jangka waktu atau tanggal yang telah disepakati antara keduanya.

Pada dasarnya kredit adalah pembiayaan atas dasar kepercayaan. Artinya prestasi yang diberikan diyakini dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur dalam kredit (Rivai,dkk. 2002: 438) adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
- b. Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit
- c. Terdapat persetujuan, tertulis berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada

pemberi kredit. janji tersebut dapat berupa ucapan lisan, atau berupa instrumen.

- d. Terdapat penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- e. Terdapat unsur waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- f. Terdapat unsur resiko baik dari pihak pemberi kredit maupun dari penerima kredit. resiko dari pihak penerima kredit dapat berupa resiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha maupun ketidakmampuan membayar. Resiko dari pihak debitur adalah adanya kecurangan dari pihak kreditor.
- g. Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi pada pemberi kredit.

3. Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kredit. pada praktiknya kredit yang terdapat dalam masyarakat terdiri dalam beberapa jenis, begitu pula dengan fasilitas pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat. Pembagian jenis kredit ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap usaha tertentu mempunyai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain ;

a. Dilihat dari segi kegunaannya

1. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu, bahan dagangan, piutang atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Kredit investasi

Kredit investasi biasanya digunakan untuk merehabilitasi, modernisasi, perluasan usaha maupun membangun proyek/pabrik batu seperti pembelian mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, pembelian alat produksi baru maupun perbaikan alat-alat produksi secara besar-besaran.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi maupun investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa.

2. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari segi jangka waktu

1. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

3. Kredit jangka panjang.

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

d. Dilihat dari segi jaminan

1. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

2. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

e. Dilihat dari sektor usaha

1. Kredit pertanian, merupakan kredit yang di biayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

2. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, misalkan peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi

3. Kredit industri yaitu, kredit untuk membiayai industri pengolahan baik industri kecil, menengah maupun besar.
4. Kredit pertambangan yaitu, jenis kredit usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
5. Kredit pendidikan yaitu, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
6. Kredit profesi, diberikan pada kalangan profesional seperti, dokter, dosen maupun pengacara.
7. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
8. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

4. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. adapun tujuan utama pemberian kredit (Kasmir. 2002: 96) adalah :

- a. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima

oleh bank. Sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah.

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit. berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai kantor.

Selain itu, tujuan kredit dapat dilihat dari pelaku utama yang terlibat dalam pemberian kredit, sebagai berikut :

a. Bank (kreditor)

1. Pemberian kredit merupakan bisnis terbesar hampir pada sebagian besar bank.
2. Penerimaan bunga dari pemberian kredit bagi sebagian bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
3. Kredit merupakan salah satu produk bank dalam memberikan pelayanan pada nasabah.

4. Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan
 5. Kredit merupakan salah satu komponen dari *aset allocation approach*
- b. Nasabah (pengusaha)
1. Kredit dapat memberikan potensi untuk mengembangkan usaha.
 2. Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan
 3. Kredit merupakan salah satu alternatif pembiayaan perusahaan
- c. Negara
1. Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan
 2. Kredit dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar
 3. Kredit dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian
 4. Kredit dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak

Tujuan kredit menurut, (Suhardjono.2003 : 161) adalah sebagai berikut :

1. Turut mensukseskan program perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
2. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan tercermin dan dapat memperluas usahanya.
3. Meningkatkan aktifitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Sedangkan tujuan kredit menurut, (Melayu S.P Hasibuan. 2005:88) yaitu :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit

2. Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kredit mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut (Rivai, dkk. 2007: 440) :

- a. Meningkatkan daya guna dari modal atau uang. Pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan, maupun peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
- b. Meningkatkan daya guna suatu barang. Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* suatu bahan tersebut meningkat. contohnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya diolah menjadi minyak kelapa.
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya melalui kredit.

- d. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat. Pengusaha akan selalu memerlukan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Dari sisi hukum permintaan dan penawaran, permintaan akan bertambah jika masyarakat telah mulai melakukan penawaran. Tingginya permintaan terhadap suatu barang tertentu akan mendorong atau menambah kegairahan pengusaha untuk meningkatkan produktivitasnya.

- e. Alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengespor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi sipenerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi nasabah yang modalnya pas-pasan.

- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan. jika kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut membutuhkan tenaga

kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

5. Prosedur Pemberian Kredit

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut :

Menurut Kasmir (2007: 110) :

a. Pengajian berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian di lampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

b. Penyelidikan berkas pinjaman.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

c. Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai dengan yang diinginkan.

d. On the spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

e. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.

f. Keputusan kredit, keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak.

g. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

h. Realisasi kredit

i. Penyaluran atau penarikan dana.

B. Analisis Pemberian Kredit.

Analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk meng-*cover* (mencukupi) permohonan kredit.

Analisis pemberian kredit ini dilakukan oleh perbankan yang akan memberi kredit usaha yaitu analisis terhadap pengusaha kecil yang akan mendirikan suatu usaha atau yang telah mendirikan usaha untuk dilanjutkan dalam hal pengembangannya.

Analisis kredit dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit.

Adapun tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai kesepakatan dengan bank. Hal ini terjadi karena dalam pemberian kredit bank menghadapi resiko, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan. Hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis kredit adalah mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam menganalisis pemberian kredit diperlukan hal-hal seperti kepercayaan dimana pihak bank harus dapat mempercayai calon-calon penerima kredit tersebut. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, bank harus memiliki keyakinan bahwa calon nasabah betul-betul dapat dipercayai.

Indikator kepercayaan ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan agunan. Kepercayaan ini dibedakan akan kepercayaan murni dan kepercayaan *reserve*. Kepercayaan murni adalah jika kreditur memberikan kredit kepada debiturnya hanya atas kepercayaan saja, tanpa jaminan lainnya. Misalnya, masyarakat menabungkan uangnya pada suatu bank hanya atas suatu kepercayaan saja, karena bank hanya memberikan tanda bukti berupa bilyet deposito, blanko buku, cek atau bilyet giro kepada penabungnya. Jika banknya dilikuidasi, penabung hanya memiliki bilyet deposito atau blanko bilyet giro saja.

Kepercayaan *reserve* diartikan kreditur menyalurkan kredit atau pinjaman kepada debitur atas kepercayaan tetapi kurang yakin sehingga bank selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB, dan lain-lain). Bahkan suatu bank dalam penyaluran kredit lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.

Proses analisa ini dapat dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk itu, ataupun sekelompok orang yang terdiri dari berbagai ahli atau begbagai profesi untuk kemudian membentuk suatu tim untuk merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi oleh bank dalam pemutusan pemberian kredit kepada calon debiturnya.

Ada beberapa prinsip dalam pemberian kredit (*Basic Faktor*) adalah sebagai berikut (Rivai, dkk, 2007: 457) :

1. *Character* (Watak)

Yaitu keadaan watak atau sifat debitur, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana itikad atau kemauan debitur memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat diperoleh melalui upaya :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah.
- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
- c. Melakukan *bank to bank informatioan*.
- d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon debitur berada.
- e. Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi
- f. Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya.

2. *Capital* (Modal)

Capital adalah jumlah modal atau dana sendiri yang dimiliki debitur. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon debitur menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan kredit.

3. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini berfungsi untuk mengakui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.

Pengukuran capacity tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan sebahai berikut:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan dan lain-lain.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon debitur mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usahanya untuk mengadakan perjanjian dengan bank.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan ketrampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin usahanya.
- e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah, mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan, mesin-mesin, administrasi dan keuangan sampai pada kemampuan merebut pasar.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis jaminan, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga tidak berwujud seperti jaminan pribadi dan rekomendasi.

5. *Condition* (Keadaan Perekonomian)

Yaitu, situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur di kemudian hari. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal seperti:

- a. Keadaan konjungtur.
- b. Peraturan-peraturan pemerintah.
- c. Situasi, politik, dan perekonomian dunia.
- d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

6. *Constraint*

Yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.

Selain hal diatas masih terdapat aspek pertimbangan lain bagi pihak bank dalam menganalisis pemberian kredit seperti :

- a. Bidang usaha
- b. Rekening
- c. Pergaulan sosial
- d. Permintaan produksi
- e. Persaingan

Disamping meningkatkan keakuratan analisis kredit dalam mengupayakan keamanan kredit, sebelum perjanjian kredit ditandatangani pada umumnya bank harus melakukan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- a. Evaluasi mengenai identitas, anggaran dasar, izin-izin yang diperlukan.
- b. Penelitian terhadap kewenangan bertindak calon debitur.
- c. Penelitian status hak dan kepemilikan jaminan.

C. Tinjauan Praktek

Kredit merupakan produk yang ada pada setiap kegiatan perbankan, jenis-jenis atau macam-macam kredit dilihat dari berbagai aspek tinjauannya sangatlah banyak, salah satunya kredit konsumtif. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

Kredit konsumtif bersumber terhadap dua penghasilan nasabahnya, ada penghasilan yang dibayarkan oleh bendaharawan yang disebut kolektif Pemda dan ada yang profesional yaitu nasabah yang berpenghasilan tetap yang tidak dibayarkan melalui bendaharawan.

Ketentuan dalam Pemberian kredit konsumtif di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian yaitu :

- a. Untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) maksimal sampai Rp. 50.000.000, sedangkan untuk PNS maksimal sampai Rp. 200.000.000, menurut persyaratan yang berlaku. Dalam peminjaman kredit khusus bagi PNS peminjamannya maksimal 50% perbulan dari penghasilan dengan semua tunjangan (tidak melebihi gaji pokok+tunjangan anak+tunjangan istri). Apabila pinjaman diatas Rp 50.000.000 wajib menyertakan jaminan tambahan berupa surat tanah dengan status SKGR/SHM. hal ini juga berlaku bagi poin kedua.
- b. Untuk anggota TNI/ POLRI jangka waktu hanya 6 tahun / 72 bulan dengan plafond maksimal Rp.60.000.000,

Di Bank Riau cabang Pasir Pangaraian produk kredit konsumtif terdiri atas beberapa bagian yaitu, kredit aneka guna, kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah dan kartu kredit.

1. Kredit Aneka guna (KAG)

Kredit aneka guna adalah kredit yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif di luar kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor, yang diberikan dengan pembayaran secara kolektif maupun non kolektif. Pembayaran kolektif adalah pembayaran yang dilakukan oleh satu orang yang ditunjuk oleh instansi atau dinas untuk memotong dan membayarkan setiap bulannya pada bank yang bersangkutan. Sedangkan pembayaran non kolektif yaitu pembayaran yang dilakukan secara perorangan oleh nasabah.

Melalui produk kredit aneka guna ini, Bank Riau memberikan kemudahan bagi karyawan atau Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendapatkan pinjaman kredit. pembiayaan yang khusus digunakan untuk berbagai keperluan multiguna bagi nasabah ini, bisa didapatkan hingga Rp. 200.000.000, dengan masa pengembalian sampai 10 tahun.

Kredit Aneka guna ini juga lebih kompetitif dari segi beban bunga. Bank Riau mematok bunga berdasarkan lama waktu pengembalian kredit. pinjaman dengan jangka waktu sampai 5 tahun bunga 10% pertahun, sedangkan untuk pinjaman dengan jangka waktu 6 sampai 10 tahun bunga 11% pertahun.

Contoh: perhitungan bunga pada kredit KAG dengan bunga plat.

Plafond : Rp. 50.000.000

Bunga : 11%

Jangka Waktu : 72 Bulan

$$\text{Angsuran pokok} = 50.000.000, / 72 = 684,444$$

$$\text{Angsuran Bunga} = \frac{50.000.000, \times 11\% \times 1 \text{ bulan}}{12 \text{ bulan}} = 458,333$$

$$\text{Angsuran total} = 684.444 + 458.333 = 1.142.777$$

Adapun tujuan pemberian kredit aneka guna yaitu :

- a. Keperluan rumah tangga.
- b. Rehabilitasi atau renovasi rumah
- c. Biaya pendidikan
- d. Biaya pengobatan
- e. Biaya pernikahan atau perkawinan
- f. Keperluan lainnya yang bersifat konsumtif.

2. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Riau

Kredit pemilikan rumah adalah kredit yang diberikan kepada perorangan yang berpenghasilan tetap atau berpenghasilan tidak tetap, untuk membeli tanah atau bangunan rumah tinggal, rumah toko, rumah susun, apartemen, atau melakukan renovasi rumah milik swadaya.

Untuk kredit pemilikan rumah Bank Riau tingkat bunga yang diberikan untuk jangka waktu dibawah 10 tahun berlaku suku bunga 8%-8.5% pertahun, sedangkan untuk jangka waktu diatas 10 tahun berlaku suku bunga 8.5%

pertahun. Tujuan pemberian kredit pemilikan rumah Bank Riau adalah sebagai berikut :

- a. Membeli tanah atau kavling untuk perumahan.
 - b. Membeli tanah dan bangunan rumah tinggal atau rumah toko.
 - c. Membeli rumah susun atau apartemen.
 - d. Membangun rumah tinggal atau rumah toko.
 - e. Merenovasi bangunan rumah tinggal, rumah toko, rumah susun atau apartemen.
3. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Bank Riau.

Kredit kendaraan bermotor adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan atau roda empat dengan sistem pembayaran angsuran baik secara kolektif maupun non kolektif. Pemasaran KKB ditujukan kepada masyarakat umum, baik yang berpenghasilan tetap, tidak tetap maupun kaum profesional, serta badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Tingkat suku bunga yang berlaku 7% pertahun.

4. Kartu Kredit

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barangnya serta pelayanan tertentu secara hutang.

Kartu kredit merupakan salah satu jenis kredit konsumtif yang didasarkan pada sumber pendapatan debitur dan dapat dipergunakan untuk keperluan apa saja dan tidak ada jaminan yang diserahkan pada bank. Kredit ini berupa fasilitas yang dapat dipergunakan kapan saja dan untuk keperluan apa saja oleh debitur.

Jadi pada saat persetujuan kartu kredit, debitur tidak menerima uang tunai, namun kredit diambil secara tunai melalui ATM atau dibelanjakan di toko, supermarket, hotel, restoran dan sebagainya.

Beberapa ketentuan yang diterapkan Bank Riau dalam menyalurkan kredit kepada nasabah yaitu :

- a. Kriteria Yang Diterapkan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dalam menyalurkan Kredit Konsumtif.

Secara umum kriteria-kriteria yang diterapkan dalam penyalurkan kredit konsumtif oleh pihak Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian yaitu nasabah yang memenuhi persyaratan atau layak untuk di berikan pinjaman dan nasabah itu dapat dikatakan apabila :

1. Nasabah yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank itu sendiri.
2. Jaminan-jaminan yang diserahkan oleh nasabah harus lengkap dan terbukti keasliannya dan nilainya baik.
3. Karakter atau kredibilitasnya baik (tepat waktu) pihak bank dapat menilai karakter nasabah yang hendak membutuhkan dana. Seperti

dalam mengajukan persyaratan yang di minta oleh pihak bank cepat dan tepat waktu.

4. Nasabah yang hendak membutuhkan dana adalah benar-benar seorang pegawai.
5. Surat pernyataan dari nasabah bahwa yang bersangkutan sedang tidak mengambil kredit yang sama di bank lain.
6. Surat kuasa dari nasabah kepada pejabat atau instansi yang berwenang membayar gaji (bendahara) dan ada kesanggupan dari pejabat tersebut untuk memotong gaji karyawan yang bersangkutan.
7. Nilai agunan yang diberikan oleh nasabah mencukupi (mengcover) untuk dapat dijadikan sebagai jaminan dengan jumlah kredit yang akan dipinjamnya.

Sedangkan syarat-syarat kredit konsumtif yang diterapkan oleh pihak Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian yaitu :

- a. Pengisian formulir permohonan
- b. Foto copy KTP suami / istri dan Kartu Keluarga sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Surat kuasa pemotongan gaji.
- d. Daftar penghasilan di ketahui pihak berwenang.
- e. Pas photo suami/istri ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

- f. Agunan berupa SK CPNS, SK PN, SK Terakhir, Karpeg dan Taspen/Asabri.
 - g. Foto copy surat nikah 2 (dua) lembar.
 - h. Surat tanah dengan status SKGR / SHM untuk pinjaman dengan plafond diatas Rp. 50 juta.
 - i. surat pernyataan dari Bendaharawan gaji.
 - j. SK Pensiun
 - k. Semua persyaratan asli dibawah bersamaan pada saat pencairan dana dilakukan.
- b. Prosedur penyaluran kredit pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian

Adapun prosedur penyaluran kredit konsumtif pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian antara lain :

1. Pengambilan formulir nasabah, nasabah harus mengambil formulir agar mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus di penuhi dalam pengajuan kredit. syarat-syarat tersebut seperti photo copy KTP, KK, dan beserta jaminannya. Sebelum menyerahkan formulir, pihak bank terlebih dahulu bertanya kepada nasabahnya apakah nasabah tersebut termasuk pegawai negeri sipil atau tidak. Karena secara khusus kredit hanya untuk pegawai negeri sipil atau pegawai perusahaan itu sendiri

dan begitu sebaliknya, jika tidak tergolong PNS berarti formulir yang diambilnya adalah formulir kredit bakulan.

2. Permohonan kredit harus dilakukan berdasarkan memorandum kredit *committe* yang sudah disetujui dan ditandatangani, oleh anggota kredit *committe* dan dilegalisir oleh *credit support*. Informasi minimal yang diberikan dalam memorandum kredit *committe* antara lain, identitas nasabah, plafond pinjaman, jatuh tempo pinjaman, suku bunga pinjaman, dan perikatan pinjaman.
3. Setelah mengajukan permohonan kredit konsumtif nasabah dapat menyerahkan dokumen-dokumen yang merupakan lampiran persyaratan permohonan kredit yang ditetapkan oleh bank.
4. Setelah menerima berkas tersebut pihak bank dapat meninjau kredit apakah layak atau tidak diberikan pinjaman. Peninjauan dan pemeriksaan langsung kelapangan (*on the spot*) dengan maksud meninjau berbagai objek yang akan dijadikan jaminan. Kemudian hasilnya di cocokkan dengan persyaratan yang telah dilengkapi dalam permohonan kredit apakah sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila layak barulah diproses berkas-berkas yang telah diajukan oleh nasabah. Tapi apabila kredit ditolak maka dibuatkan surat penolakan.
5. Setelah berkas nasabah disetujui oleh pimpinan cabang, nasabah dapat datang kembali untuk akad kredit. dimana nasabah harus

menandatangani surat perjanjian kredit dalam perjanjian kredit ini memuat sebanyak 13 pasal yang menjadi perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Dan apabila surat perjanjian tersebut telah ditandatangani, maka surat penegasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian kredit, karena dengan tegas telah disebutkan nama dan tanggalnya.

6. Pencairan, bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah yang bersangkutan, bila syarat-syarat yang harus di penuhi nasabah telah dilaksanakan, dalam pencairan dana ini nasabah dikenai biaya administrasi kredit, biaya materai serta biaya provisi 1% dari pinjaman.dengan perhitungan seperti dibawah ini.

Contoh :

Jumlah bank garansi : Rp. 100.000.000

Jangka waktu : 10 tahun

Provisi ditetapkan 1% setahun

Besarnya biaya provisi = $10/12 \times 1\% \times \text{Rp.}100.000.000 = \text{Rp.}833.333$

- c. Kebijakan kredit yang ditetapkan oleh Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian.

1. Asas likuiditas yaitu asas yang mengharuskan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian untuk tetap menjaga likuiditasnya, karena apabila bank

tidak liquid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari nasabah.

2. Asas solvabilitas yaitu menerima simpanan dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit.
 3. Asas Rentabilitas yaitu cara untuk mencari atau memperoleh laba baik mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan perkembangan dan dengan pendapatan bunga yang di terima dari para debitur.
- d. Aspek-aspek penilaian kredit yang diterapkan oleh Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian.

Disamping menggunakan penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai aspek-aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan nama studi kelayakan usaha. Penilaian dengan modal ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang.

Aspek-aspek yang dinilai antara lain :

1. Aspek Yuridis

Penilaian aspek yuridis ini antara lain meliputi status hukum badan usaha misalnya akte pendirian yang telah di sahkan oleh pihak yang berwenang, legalitas, usaha meliputi kelengkapan izin usaha dan yang cukup penting adalah bagaimana legalitas barang-barang jaminan yaitu

kepemilikan harus di dukung dengan dokumen yang sah dan dalam penguasaan calon debitur.

2. Aspek Pemasaran

Penilaian yang perlu ditekankan di sini adalah menyangkut kemampuan daya beli masyarakat, kompetisi, pangsa pasar, kualitas produksi, dan sebagainya.

3. Aspek Manajemen

Dalam penilain yang perlu di tekankan di sini adalah menyangkut struktur organisasi dan anggota-anggota manajemen termasuk kemampuan dan pengalamannya serta pola kepemimpinan yang diterapkan oleh manajemen.

4. Aspek Teknis

Penilaian terhadap aspek teknis ini antara lain meliputi kelancaran produksi, kapasitas produksi, mesin-mesin, peralatan, dan ketersediaan kontinuitas bahan baku. Disamping itu kualitas tenaga kerja yang memiliki fasilitas teknis yang ada cukup mempengaruhi penilaian aspek teknis.

5. Aspek Sosial Ekonomi

Penilaian pada aspek ini pada dasarnya untuk mengetahui apakah usaha yang akan dibiayai dengan kredit Bank Riau tersebut diterima

atau memberi dampak positif atau negatif terhadap lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan itu apakah proyek tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

6. Aspek Financial

Penilaian aspek financial meliputi keadaan keuangan perusahaan debitur yang akan dibiayai oleh Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian. Untuk melakukan penilaian keadaan keuangan perlu diperoleh data-data mengenai laporan keuangan, arus dana, realisasi, produksi, pembelian dan penjualan. Disamping itu sumber dan penggunaan akan sangat membantu dalam melakukan penilaian secara akurat.

Di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian penyaluran atas kredit konsumtif lebih banyak di bandingkan kredit produktif salah satu faktor penyebabnya adalah besarnya permintaan masyarakat Pasir Pangaraian khususnya pegawai negeri pada kredit konsumtif. Dimana kredit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan lainnya.

Pada tabel di bawah ini dapat lihat perbandingan penyaluran kredit konsumtif dengan kredit produktif di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian.

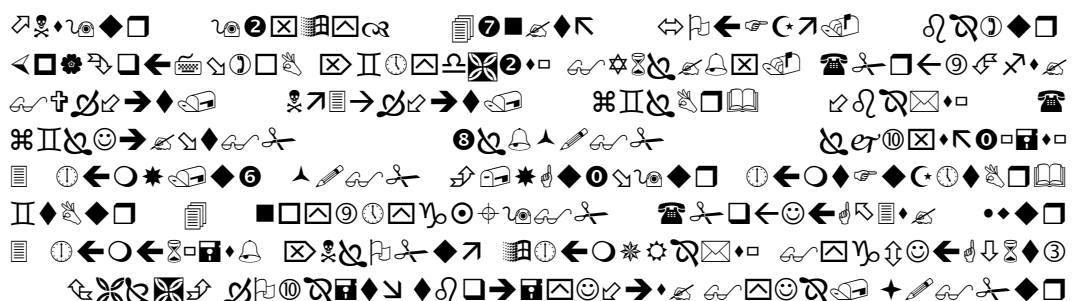
Tabel.III.1
Neraca Rinci
Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian
Tanggal 02 maret 2010.

Keterangan	Saldo Rupiah	Saldo Valas	Total
Kredit Konsumtif	289.031.878.497	00	89.031.878.497
Kredit KPR	9.621. 188.644	00	9.621.188.644
Kredit KKB	13.910.685.319	00	3.910.685.319
Kredit KAG	270.879.672.658	00	270.879.672.658
Kredit Pegawai Bank Riau	4.615.773.488	00	4.615.773.488
Kredit EKS kartu kredit	4.558.388	00	4.588.388
Kredit Produktif	150.170.246.253	00	50.170.246.253
Kredit investasi	72.358.055.382	00	72.358.055.382
Kredit Modal Kerja	77.812.190.871	00	77.812.190.871
Total Kredit yang diberikan	439.202.124.750	00	439.202.124.750

Sumber : Bagian Umum Bank Riau Cabang Pasir Pangarain.

Dari tabel diatas dapat penulis simpulkan bahwa perbandingan kredit konsumtif di bandingkan kredit produktif, lebih besar kredit konsumtif. Dimana penyaluran kredit konsumtif Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian sampai pada tanggal 2 maret tahun 2010 berjumlah sekitar 289.031.878.497. penyaluran kredit konsumtif yang paling besar adalah untuk pegawai negeri pada kredit aneka guna sebesar 270.879.672.658, sedangkan untuk kredit kepemilikan rumah 9.621.188.644, Kedit kendaraan bermotor 3.910.685.319, kredit pegawai negari Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian 4.615.773.488, dan kredit EKS kartu kredit sebesar 4.558.388. sedangkan untuk kredit produktif permintaan kreditnya hanya sebesar 150.170.246.253 dengan rincian kredit investasi sebesar 72.358.055.382 dan kredit modal kerja 77.812.190.871.

Al-Baqarah ayat 283.



“Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah:283)

Bila ditinjau dari hukum islam kredit yang diberikan Bank Riau kepada nasabah tidak terlepas dari bunga. Sedangkan bunga kredit bertentangan dengan ajaran islam, karena menurut pandangan islam bunga disamakan dengan riba.

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam.

Dalam muamalah riba itu ada dua macam, yaitu:

1. Riba Nasi'ah ialah tambahan yang dipersyaratkan akan diambil oleh kreditur dan debitur sebagai imbalan pengukuhan waktu yang diberikan oleh pihak kreditur untuk melunasi hutang baik ketika hutang itu akan dilakukan maupun ketika debitur meminta penangguhan.
2. Riba Fadhal adalah kelebihan yang dihasilkan karena perbedaan sifat barang diperjual belikan.

Menyangkut persoalan bunga kredit maka hal ini termasuk dalam kategori riba nasi'ah, karena adanya persamaan jenis. Larangan riba nasi'ah mengandung implikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif didepan pada suatu pinjaman, sebagai imbalan karena menunggu, menurut syari'ah tidak diperbolehkan. Ayat

Al-Qur'an dapat dijadikan pedoman tentang adanya larangan riba : Surat Ar-rum ayat 39.

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.

Dari ayat diatas jelas bahwa riba dilarang dalam islam. Dan umat islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Sekarang timbul persoalan apakah bunga kredit diperbolehkan atau tidak, karena bunga kredit merupakan tambahan dari pinjaman pokok. Berbagai pendapat berkembang dikalangan ulama selaras dengan perkembangan dunia perbankan dan lembaga-lembaga keuangan nonbank yang memberikan kredit kepada masyarakat.

Dalam sidang Lajnah Bahsul Masa'il, sebagian ulama masih berbeda berpendapat tentang hukum bunga bank konvensional, pendapat pertama dengan beberapa variasi keadaan (M. Syafi'i Antonio, 2001:63) antara lain sebagai berikut :

- a. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- b. Bunga itu sama dengan riba, tetapi boleh dipungut jika sistem perbankan yang islami belum ada atau belum beroperasi.
- c. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat.

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut :

- a. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- b. Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.

- c. Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan dibank, hukumnya boleh.
- d. Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunga terlebih dahulu secara umum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk kebutuhan pribadi atau konsumtif para nasabah. Kredit konsumtif Bank Riau Cabang Pasir pangaraian terdiri atas Kredit Aneka Guna, Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaran Bermotor, Kredit Pegawai Bank Riau dan Kredit EKS kartu kredit.
2. Dalam pemberian kredit dilakukan terlebih dahulu analisis terhadap kredit untuk menentukan layak atau tidak kredit tersebut diberikan kepada nasabah dengan menggunakan prinsip yaitu character, capability, capital, collateral, condition dan contraint.
3. Dalam mengajukan permohonan kredit oleh debitur harus melalui tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian.
4. Dalam penyaluran kredit Bank Riau Cabang Pasir pangaraian menetapkan kriteria-kriteria tertentu bagi nasabahnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

5. Kebijakan yang ditetapkan bank riau dalam menyalurkan kreditnya yaitu melalui asas likuiditas, asas solvabilitas dan asas rentabilitas. Sedangkan aspek-aspek yang harus dipertimbangkan oleh bank riau yaitu, aspek yuridis, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek manajemen dan aspek finansial.
6. Kredit konsumtif merupakan kredit dengan jumlah terbanyak yang disalurkan oleh Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dibandingkan dengan kredit produktif, dengan perbandingan 3:1. Dimana permintaan tertinggi pada kredit konsumtif dilakukan oleh pegawai negeri sipil.
7. Menurut pandangan islam bunga kredit termasuk dalam kategori Riba Nasi'ah, karena adanya persamaan jenis. Dan bunga kredit konsumtif termasuk riba karena adanya unsur penambahan harta secara batil dan adanya unsur manipulasi terhadap orang yang terjepit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulisan akhir dari skripsi minor ini penulis menyumbangkan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan penyaluran kredit pada Bank Riau. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Bank Riau diharapkan dapat meningkatkan jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Kepada seluruh karyawan yang ada diharapkan memberikan yang terbaik untuk perkembangan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dan penyaluran kredit itu sendiri.
3. Para karyawan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin kepada nasabah yang melakukan transaksi di Bank Riau.
4. Bagi nasabah diharapkan dapat meningkatkan saldo tabungan yang mereka miliki agar pihak bank dapat lebih meningkatkan lagi penyaluran kreditnya.

DAFTAR PUSTKA

Hasibuan, Melayu S.P, 2001, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta : Bumi Aksara

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1988

Kasmir, 2004, Manajemen Perbankan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Rivai, Veithzal, dkk.2007, Bank and Financial Institution Manajement, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, jakarta: PT.Rja Grafindo Persada.

Muljono, Pudjo,Teguh, 2001, Manejemen Perkreditan, Yogyakarta: BPFE-Yokjakarta.

Firdaus, Rahmat dan Maya Apriyanti, 2004, Manejemen perkreditan Bank umum, Bandung: Alfabeta.

Karim, Adiwarmarman,Azwar, 2006, Bank Islam, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001, Bank Syariah, Jakarta: Gema Insani

Alex M.A,2005, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer, Surabaya : Karya Harapan.

Dokumen Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian.

DAFTAR TABEL**Tabel.****I.1**..... 7**Tabel. III.1**..... 61**DAFTAR GAMBAR****Gambar.1.** Struktur Organisasi Bank Riau Cabang Pasir
Pangaraian..... 23